



bkkbn 

LAPORAN KINERJA (Lkj) TAHUN 2023

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA DUMAI**

Jl. Pangeran Diponegoro No. 157
Telp. Telp. 0765- 439159
Email: dppkbdumai@gmail.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Maksud dan Tujuan	17
1.4 Isu-isu Strategis	19
1.5 Cascading Kinerja.....	19
1.6 Peta Proses Bisnis.....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.1 Rencana Strategis	21
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	23
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program	25
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
3.1 Analisis Capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023... 33	
3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 – 2023	39
3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir periode renstra.....	41
3.4 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional (target SPM)...	42
3.5 Akuntabilitas keuangan.....	43
3.6 Pencapaian kinerja dan anggaran	44
3.7 Efisiensi penggunaan sumber daya	45
3.8 Prestasi dan Penghargaan	46

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran	49

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2023
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 beserta lampiran perubahan
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2023
7. Penghargaan

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023.....	25
Tabel 2.2	Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023.....	26
Tabel 2.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai.....	28
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023.....	29
Tabel 2.5	Program Kerja Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023.....	29
Tabel 2.6	Perubahan Program Kerja Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023.....	30
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	32
Tabel 3.2	Atribut Capaian Indikator Kinerja.....	33
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023.....	34
Tabel 3.4	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	39
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra.....	41
Tabel 3.6	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional.....	42
Tabel 3.7	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas).....	44
Tabel 3.8	Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	44
Tabel 3.9	Prestasi dan Penghargaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berecana Kota Dumai Tahun 2023.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai.....	17
Gambar 1.2	Cascading Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai.....	20
Gambar 1.3	Peta Proses Bisnis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai.....	21

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai. Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai pada

tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Dumai, 15 Januari 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA DUMAI,



ELYWARTI, SKM

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19661029 199003 2 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 56 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Dumai yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai, maka sebagai unsur teknis, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai menjalankan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
4. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan Keluarga berencana;

6. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
7. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
9. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber keluarga berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai melaksanakan MISI yang ke 2 (dua) RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjati diri Melayu”** dan SASARAN yang ke 1 (satu) yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu **“ Mengendalikan laju pertumbuhan Penduduk dalam Program Bangga Kencana “**

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai 2021 – 2026 telah menetapkan 1 (Satu) Tujuan dengan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 4 (Empat) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 45 (Empat Puluh Lima) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

- I. Program Pengendalian Penduduk

1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
 2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
- II. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
 - Pengendalian Program KKBPK
 2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

- Pembinaan IMP dan Program KKBPk di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
 - Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPk di Kampung KB
- III. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

- Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
- Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

IV. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai pada Tahun 2023 mengalami 2 kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA DPPKB TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)	46,6 % 19,93 %

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis OPD sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.511.696.622,- (Empat Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) untuk melaksanakan 4 (Empat) Program Kerja antara lain :

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4
1.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 163.000.000,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 237.980.830,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 255.700.100,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.855.015.692,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
J U M L A H		Rp. 4.511.696.622,-	

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4
1.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 453.720.000,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 2.600.479.830,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - KB dan DAK Non Fisik- BOKB-KB
3.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 1.721.020.100,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana dan DAK Non Fisik- BOKB-KB Bagi Hasil
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.445.052.852,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp. 9.220.272.782,-	

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2022	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	46,6%	66,02%	53.80%	√			
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)	19,93%	13,02%	27.2%	√			

LAPORAN KINERJA (LKj)

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai selama tahun 2023 termasuk kategori 1 (satu) yaitu *SANGAT BERHASIL*.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 9.220.272.782,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) bersumber dari Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB – Reguler – KB, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil dan DAK Non Fisik-BOKB-KB. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 8.936.991.782,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 283.281.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

1.	Belanja Operasi	:	Rp.	8.936.991.782,-
2.	Belanja Modal	:	Rp.	283.281.000,-
	J u m l a h	:	Rp.	9.220.272.782,-

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut :

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan :					4.775.219.930,-	4.608.935.350,-	96,51%
Mengendalikan laju pertumbuhan Penduduk dalam Program Bangga Kencana	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%)	2,08%	2,07%	100,48%			
Sasaran :							

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	46,6%	66,02%	141,67%			
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	19,93%	13,02%	153,07%			
Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	50%	50%	98,03%	453.720.000,-	451.329.100	99,47%
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	51%	50%	117,64%			
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,54%	2,2%	95%	2.600.479.830,-	2.448.718.400,-	94,16%
	ASFR 15-19	12,67%	12,6%	100,55%			
	UKP	22 Usia	22,36%	101,64%			
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	78%	78%	100%	1.721.020.100,-	1.708.887.850,-	99,30%

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai mengalokasikan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA (LKj)

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI		KETERANGAN
1	2	3	4	5	6		7
1.	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	141,67%	99,47%	42,20	Efisien	-
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	153,07%	96,20%	56,87	Efisien	-

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Tahun 202 adalah sebagai berikut :

- a. Pada Indikator Kinerja Utama 1 Tingkat Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) tingkat efisiensinya adalah 42 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023(141,67%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2022 (99,47%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
- b. Pada Indikator Kinerja Utama 2 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) tingkat efisiensinya adalah 56 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (153,07%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2022 (96,20%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke 2 atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (*responsibilitas*) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 56 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai menjalankan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
4. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan Keluarga berencana;
6. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
7. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
9. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber keluarga berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Sekretariat

Bertugas melaksanakan tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- a. *Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset*

Bertugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan dinas.

b. *Subbagian Tata Usaha*

Bertugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.

3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bertugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan ditingkat daerah.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari:

a. *Kelompok Substansi Advokasi dan Penggerakan melaksanakan tugas :*

- mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dibidang advokasi dan pergerakan;
- mengumpulkan bahan penyusunan rencana dibidang advokasi dan pergerakan;
- menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan dibidang advokasi dan pergerakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang advokasi dan pergerakan;
- memantau dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang advokasi dan pergerakan;
- memantau dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan iklan layanan keluarga berencana, baliho dan papan motivasi keluarga berencana;
- melaksanakan penerangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui sarana Mupen (Mobil Unit Penerangan) keluarga berencana;
- membina, mengoordinasikan dan melaksanakan hari besar yang berhubungan dengan keluarga dan perlombaan dalam rangka Hari Keluarga;

- membina, mengoordinasikan Insitusi Masyarakat Pedesaaan (IMP), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD;
- membina, mengoordinasikan dan mengerakkan Tokoh Agama (TOGA) dan Tokoh Masyarakat (TOMA);
- memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang Advokasi dan Pergerakan IMP;
- melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Advokasi dan Pergerakan IMP;
- mengerakkan Institusi masyarakat untuk peningkatan program KB;
- mengadakan pertemuan dengan bawahan untuk memberikan arahan kerja dan membahas kinerja bawahan;
- melakukan penilaian kepada bawahan dengan mengisi Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- meyusun konsep rencana kerja pelaksanaan kebijakan teknis; dan
- menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Kelompok Substansi Penyuluhan dan Pemberdayaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana melaksanakan tugas :

- menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan PKB/PLKB dan kader keluarga berencana serta mekanisme operasional lini lapangan di tingkat daerah;
- mengolah dan menganalisa kondisi petugas lapangan tingkat daerah dan Kecamatan;
- menyusun sasaran dan permasalahan prioritas PKB/PLKB dan kader keluarga berencana tingkat daerah;
- menyusun sasaran dan permasalahan prioritas PKB/PLKB dan kader keluarga berencana tingkat daerah;
- menyusun sasaran dan permasalahan prioritas PKB/PLKB dan kader keluarga berencana;

- menyusun perencanaan langkah-langkah pembinaan terhadap PKB/PLKB dan kader keluarga berencana;
- melaksanakan petunjuk teknis pembinaan lini lapangan;
- melakukan koordinasi lintas komponen internal tingkat daerah terhadap upaya pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Kader KB, Melakukan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
- membina PKB/PLKB dan kader keluarga berencana;
- melakukan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan PKB/ PLKB;
- mengusulkan pemberian penghargaan untuk PKB/PLKB dan kader keluarga berencana kepada pimpinan;
- mengembangkan upaya-upaya pengembangan dalam pembinaan PKB/PLKB dan kader keluarga berencana;
- mengevaluasi pembinaan dan kinerja PKB/PLKB dan kader keluarga berencana;
- mengolah dan menganalisa kondisi petugas lapangan tingkat daerah;
- menyusun sasaran dan permasalahan prioritas PKB/PLKB tingkat daerah;
- menyusun perencanaan langkah-langkah pembinaan terhadap PKB/PLKB;
- menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis pembinaan lini lapangan;
- mengadakan pertemuan dengan bawahan untuk memberikan arahan kerja dan membahas kinerja bawahan;
- menyusun konsep rencana kerja pelaksanaan kebijakan teknis di seksi penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan kader keluarga berencana;
- menilai kepada bawahan dengan mengisi SKP; dan

- menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Kelompok Substansi *Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga melaksanakan tugas :*

- menyusun rencana kerja/kegiatan analisis dampak kependudukan bulanan, dan tahunan di daerah;
- menyiapkan bahan konsep perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis analisis dampak kependudukan;
- menyiapkan bahan penyusunan strategi pelaksanaan program analisis dampak kependudukan;
- menyiapkan bahan untuk penyusunan konsep pelaksanaan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis pelaksanaan program analisis dampak kependudukan;
- menyiapkan bahan penyusunan materi dan substansi kegiatan analisis dampak kependudukan;
- menyiapkan bahan perencanaan strategi dan kajian analisis dampak kependudukan di daerah;
- menyampaikan konsep/rancangan bahan pelaksanaan analisis dampak kependudukan di daerah kepada atasan;
- mengadakan sarana penyelenggaraan program-program pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- menyusun rencana pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) dan Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) di tingkat daerah;
- menyusun konsep-konsep pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, KBKR, dan KSPK di tingkat daerah;
- melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, KBKR dan KSPK di tingkat daerah; melaporkan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, KBKR dan KSPK di tingkat daerah kepada pimpinan.

4. Bidang Keluarga Berencana

Bertugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana ditingkat daerah.

Bidang ini mempunyai Seksi yaitu :

a. *Kelompok Substansi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi melaksanakan tugas :*

- menyiapkan data basis/bahan untuk penyusunan kebutuhan alat kontrasepsi (alkon) dan penyaluran alkon dan pengelolaan alkon barang milik negara;
- mengusulkan sumber daya manusia sebagai pengelola alkon untuk mengelola alkon barang milik negara;
- melakukan sosialisasi aturan tentang tata cara pengelolaan alkon dan pengelolaan alkon barang milik negara;
- mengevaluasi realisasi alkon, pengelolaan Alkon, pengelolaan alkon, akuntansi dan memberi umpan balik kepada user;
- membina kepada seluruh pengelolaan alkon, pengelolaan alkon, akuntansi, barang milik negara dan sarana program dan pelaksanaan barang milik negara tentang administrasi pembukuan baik ditingkat kecamatan dan daerah;
- menyiapkan data fisik untuk masukan kebijakan operasional dibidang pelaksanaan pendistribusian alkon;
- menyiapkan data fisik untuk menyusun rencana kebutuhan alkon maupun alat non kontrasepsi;
- memantau penerimaan barang-barang kepada komponen pengguna;
- memantau penyimpanan barang-barang di gudang untuk menghindari kemungkinan bahaya kebakaran, penurunan kualitas, kadaluarsa dan kerugian lainnya;
- mengidentifikasi kebutuhan alkon;
- menyusun rencana dan anggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- menyusun rencana administrasi dan pelayanan penyelenggaraan pelayanan alkon;

- menyiapkan bahan konsep kebijakan dan strategi operasional dibidang pelayanan alkon;
- menyiapkan bahan dalam rangka upaya-upaya tercapainya program pendistribusian alkon;
- menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka upaya-upaya tercapainya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program pengendalian dan pendistribusian alkon;
- menyiapkan hubungan kerja/kerjasama dengan komponen dan instansi terkait;
- mempertanggungjawabkan aktifitas yang dilimpahkan dalam bentuk laporan pelaksanaan tugas tersebut dan melaksanakan kontinuitas dari kegiatan;
- mengembangkan kemampuan bawahan melalui penugasan, pendelegasian tugas, memberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- membina kedisiplinan dan penilaian kinerja bawahan;
- melakukan penilaian kepada bawahan dengan SKP; dan
- menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. *Kelompok Substansi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana melaksanakan tugas:*

- menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta pencegahan masalah kesehatan reproduksi;
- menyiapkan konsep rencana kerja dan rencana kegiatan pelaksanaan kebijakan pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta pencegahan masalah kesehatan reproduksi;
- menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan dan usulan anggaran pelaksanaan kebijakan pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta pencegahan masalah kesehatan reproduksi;

- menyiapkan bahan konsep evaluasi kegiatan pelaksanaan kebijakan pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta pencegahan masalah kesehatan reproduksi;
- menyiapkan koordinasi hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait pelaksanaan kebijakan pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta pencegahan masalah kesehatan reproduksi;
- menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang;
- melaksanakan tugas kegiatan penyiapan pelaksanaan pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta pencegahan masalah kesehatan reproduksi serta tugas lainnya sesuai petunjuk Kepala Bidang;
- menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka upaya-upaya tercapainya;
- melakukan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program pengendalian dan pendistribusian alkon;
- menyiapkan hubungan kerja/kerjasama dengan komponen dan instansi terkait;
- mengumpulkan bahan/materi yang berkaitan dengan tugas yang akan dikerjakan;
- mempertanggungjawabkan aktifitas yang dilimpahkan dalam bentuk laporan;
- melaksanakan tugas tersebut dan melaksanakan kontinuitas dari kegiatan;
- mengembangkan kemampuan bawahan melalui penugasan, pendelegasian, tugas, memberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- membina kedisiplinan dan penilaian kinerja bawahan;
- menilai kepada bawahan dengan SKP;
- menyusun konsep rencana kerja pelaksanaan kebijakan teknis; dan

- menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. *Kelompok Substansi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Berkeluarga Berencana melaksanakan tugas :*

- pelaksanaan kebijakan pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta;
- menyiapkan bahan untuk konsep rencana kerja dan rencana kegiatan pelaksanaan kebijakan pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta;
- menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan dan anggaran pelaksanaan kebijakan pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta;
- menyiapkan bahan untuk konsep evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta;
- menyiapkan koordinasi hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait pelaksanaan pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta;
- menyiapkan pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta, serta tugas lainnya sesuai petunjuk Kepala Bidang;
- menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah terpencil, perbatasan dan miskin perkotaan serta peningkatan kesertaan keluarga berencana pria di daerah
- menyiapkan bahan konsep rencana kerja dan rencana kegiatan pelaksanaan kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah terpencil, perbatasan dan miskin perkotaan serta peningkatan kesertaan keluarga berencana pria di daerah;
- menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan dan anggaran pelaksanaan kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan

keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil, perbatasan dan miskin perkotaan serta peningkatan kesertaan keluarga berencana pria di daerah;

- menyiapkan bahan konsep evaluasi pelaksanaan kegiatan kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah terpencil, perbatasan dan miskin perkotaan serta peningkatan kesertaan keluarga berencana pria di daerah;
- melakukan koordinasi hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait pelaksanaan kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah terpencil, perbatasan dan miskin perkotaan serta peningkatan kesertaan keluarga berencana pria di daerah;
- menyiapkan pelaksanaan kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah terpencil, perbatasan dan miskin perkotaan serta peningkatan kesertaan keluarga berencana pria di daerah, serta tugas lainnya sesuai petunjuk Kepala Bidang; dan
- menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya

5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Bidang ini mempunyai Seksi yaitu :

a. Kelompok Substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melaksanakan tugas :

- mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan bidang pemberdayaan keluarga dan keluarga sejahtera;
- menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan kesejahteraan keluarga;

- merealisasikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk program-program dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- melaksanakan pemaduan atau sinkronisasi program-program dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- melaksanakan pengembangan program-program yang ada dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi/ lembaga terkait;
- mengumpulkan data dan informasi mengenai perkembangan ekonomi keluarga, bersumber dari evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan kebijakan program pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- mengumpulkan data dan informasi mengenai perkembangan ekonomi keluarga sebagai bahan untuk menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan;
- menyusun petunjuk pelaksanaan program maupun anggaran pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- melakukan pembinaan operasional program ke kecamatan dan kelurahan;
- melakukan upaya terlaksananya monitoring dan pengendalian program pemberdayaan kesejahteraan keluarga secara terpadu di daerah;
- mengembangkan kemampuan bawahan melalui penugasan, pendelegasian tugas, memberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- membina kedisiplinan;
- menilai kepada bawahan dengan mengisi SKP;
- memfasilitasi memecahkan permasalahan;
- memberikan informasi kegiatan program maupun anggaran dari tingkat daerah;
- membantu memberikan evaluasi dan monitoring dalam pencapaian Kontrak Kerja Provinsi (KKP);

- menyiapkan bahan strategi pelaksanaan kegiatan disetiap jenjang;
- memberikan motivasi pengelola program kota dumai agar kinerja semakin meningkat;
- melaksanakan 6 (enam) aspek Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) untuk menuju kepada usaha ekonomi produktif;
- mengupayakan pelabelan (izin halal) untuk pengembangan pemasaran UPPKS;
- melakukan kerjasama dengan asosiasi kelompok UPPKS dalam memfasilitasi 6 (enam) aspek UPPKS;
- melakukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam mengembangkan pemasaran hasil produksi;
- mengumpulkan bahan/materi yang berkaitan dengan tugas yang akan dikerjakan; dan
- menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Kelompok Substansi Ketahanan Keluarga melaksanakan tugas :

- menyiapkan bahan-bahan untuk melaksanakan konsep kebijakan dan strategi pelaksanaan pengendalian program pembinaan ketahanan keluarga balita, anak, dan lanjut usia;
- menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian program pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia;
- menyusun rencana kerja tahunan dan bulanan;
- menyiapkan perencanaan pembinaan operasional program ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia;
- melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia;
- melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia secara terpadu;
- melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait;

- memfasilitasi pelaksanaan program keluarga berencana di daerah;
- menyusun program keluarga berencana daerah kabupaten/kota lain bersama pengelola program keluarga berencana daerah;
- mengevaluasi pencapaiannya program keluarga berencana daerah di wilayah fasilitasi;
- memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana daerah;
- mengendalikan pelaksanaan program keluarga berencana di wilayah fasilitasi;
- mengembangkan kemampuan bawahan melalui penugasan, pendelegasian tugas, memberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- membina kedisiplinan;
- menilai kepada bawahan dengan SKP;
- mengumpulkan bahan/materi yang berkaitan dengan tugas yang akan dikerjakan;
- mempertanggungjawabkan aktifitas yang dilimpahkan dalam bentuk laporan pelaksanaan tugas tersebut dan melaksanakan kontinuitas dari kegiatan;
- menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. *Kelompok Substansi Ketahanan Remaja melaksanakan tugas :*

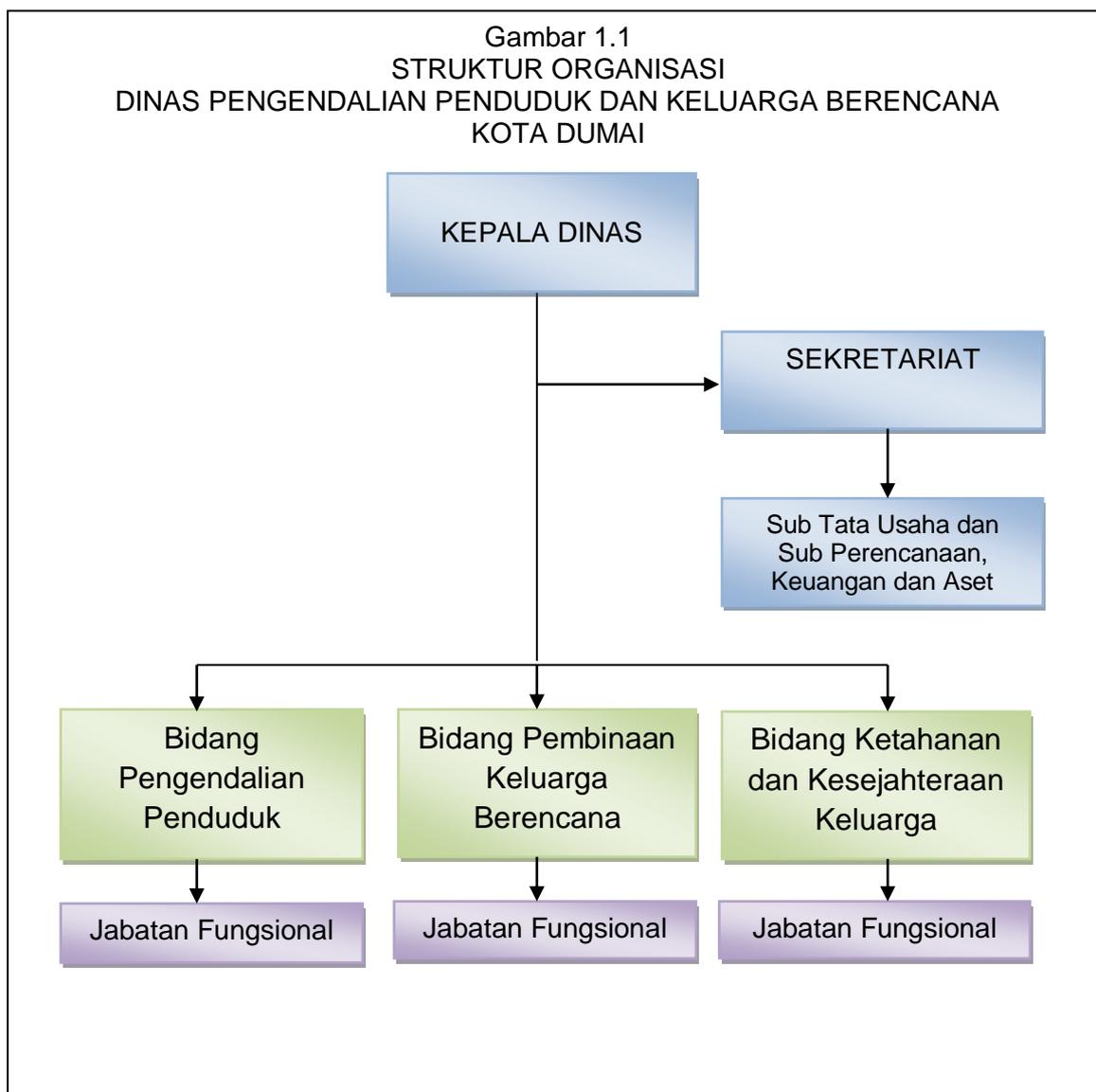
- mengumpulkan data dan informasi tentang perkembangan ketahanan remaja bersumber dari hasil evaluasi tahun sebelumnya;
- melaksanakan kajian data-data objektif tentang remaja dari berbagai sumber untuk dijadikan dasar bagi perencanaan strategis dan kebijakan yang akan diambil;
- mengolah data hasil evaluasi, hasil analisis menjadi suatu masukan untuk bahan pembuat kebijakan operasional.
- melaporkan hasil analisa dan pengolahan data dan informasi tersebut di atas kepada atasan langsung;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan rencana operasinal tentang remaja di daerah;

- melaksanakan monitoring dan pengendalian program dan kegiatan remaja;
- mengadakan pertemuan dengan bawahan untuk memberikan arahan kerja dan membicarakan mengenai kinerja bawahan.
- mengembangkan kemampuan bawahan melalui penugasan, pendelegasian tugas, memberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- melakukan pembinaan kedisiplinan;
- menilai kepada bawahan dengan SKP;
- mengumpulkan bahan kebijakan yang ada di komponen;
- memperbaiki bahan kebijakan sesuai arahan dari atasan langsung;
- menyusun laporan keseluruhan dari komponen dan memberikan pada atasan langsung;
- melakukan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang ketahanan remaja ke kecamatan;
- menyiapkan koordinasi dengan mitra kerja terkait tentang kesehatan reproduksi (kespro) remaja melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- menyusun materi/bahan evaluasi pelaksanaan UKS di tingkat daerah;
- menilai sekolah sehat;
- melakukan promosi dan sosialisasi tentang remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi (PHR) serta Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui berbagai media elektronik;
- melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan mitra kerja terkait;
- melakukan orientasi program remaja dan PHR;
- melakukan koordinasi dengan bagian Organisasi Perangkat Daerah terkait;

Susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi Sub Tata Usaha dan Sub Perencanaan, Keuangan dan Aset;

- c. Bidang Pengendalian Penduduk;
- d. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana;
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKjIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;

3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindak lanjut tahun berikutnya;
4. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang perlu ditangani sebagai berikut:

1. Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi
2. Rendahnya kesadaran pasangan usia subur untuk ber KB
3. Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Dumai diantaranya akibat migrasi masuk penduduk
4. Masalah KB merupakan masalah yang kompleks dan terintegrasi yang tidak terlepas dari berbagai faktor sehingga upaya pemecahannya harus secara strategis melibatkan sektor terkait. Pengalaman menunjukkan kerja sama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan belum membuahkan hasil yang optimal. Sehingga untuk dapat mencapai masyarakat sejahtera dan berkualitas tersebut sangat dibutuhkan koordinasi secara sektoral berdasarkan azas kemitraan dan kerja sama.
5. Pemberlakuan otonomi daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif dan inovatif yang mampu berkompetisi serta bertanggung jawab dan mempunyai pemikiran dalam menghadapi persaingan serta tantangan global di masa depan. Kondisi tersebut sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung berjalannya otonomi daerah dalam

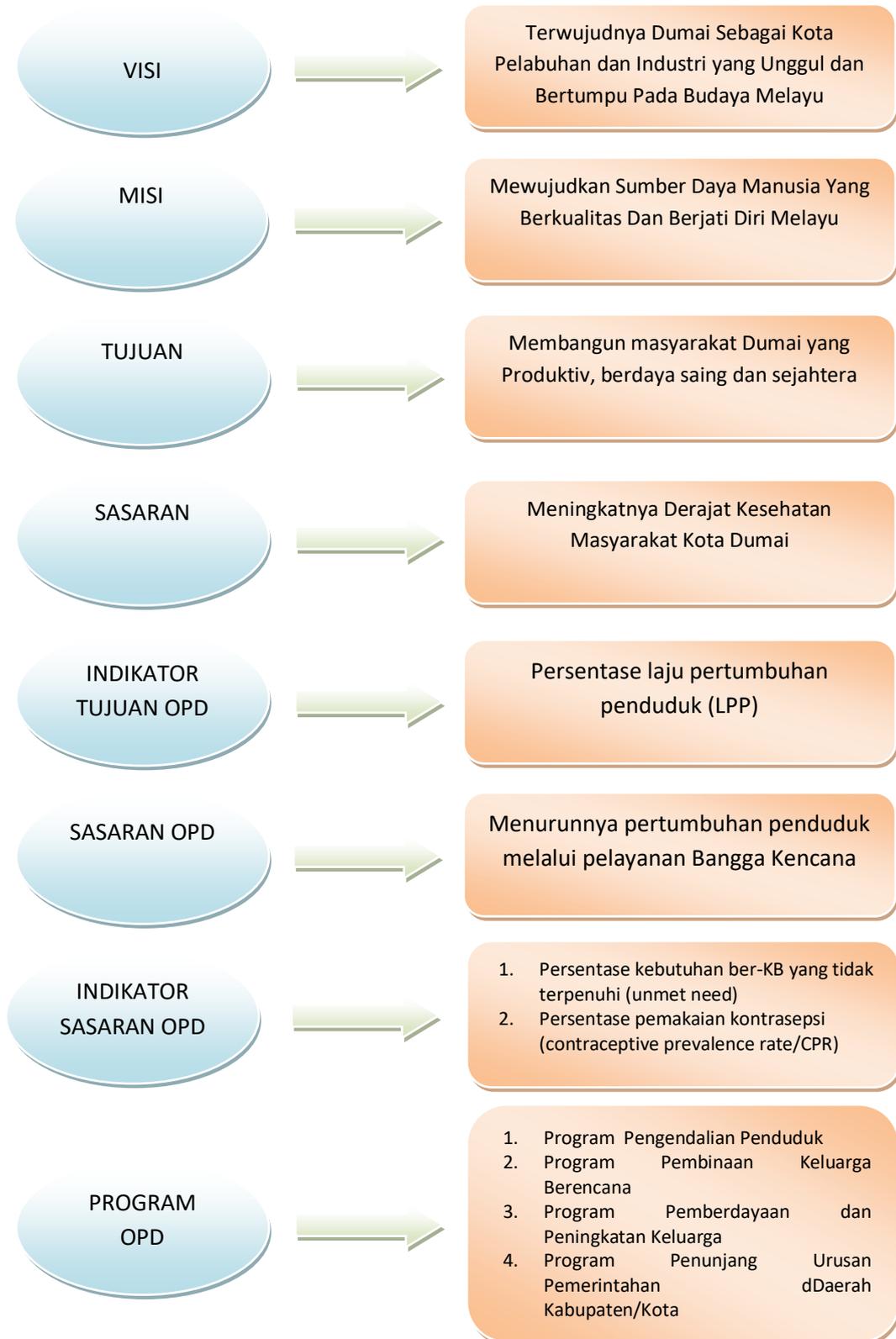
meningkatkan masyarakat sejahtera dan berkualitas serta menghadapi era persaingan bebas sebagai akibat globalisasi yang menimbulkan adanya pengaruh negative dari luar.

6. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai masih belum maksimal. Pemerataan sarana dan prasarana serta pendistribusian tenaga penyuluh dalam upaya pemerataan keterjangkauan pelayanan masyarakat Dumai masih perlu ditingkatkan, khususnya agar dapat menjangkau daerah-daerah sulit. Untuk dapat memberikan pelayanan masyarakat yang bermutu guna mewujudkan visi dan misi maka masih diperlukan penyesuaian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Disadari bahwa alokasi dana pembangunan di daerah lebih memprioritaskan pada pembangunan fisik termasuk infrastruktur maupun pembangunan perekonomian. Pembiayaan pembangunan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kurang mendapatkan alokasi dana yang memadai, hal ini dikarenakan hasil dan dampak dari pembangunannya tidak dapat diukur secara kasat mata dalam kurun waktu yang relatif singkat.

1.5 CASCADING KINERJA

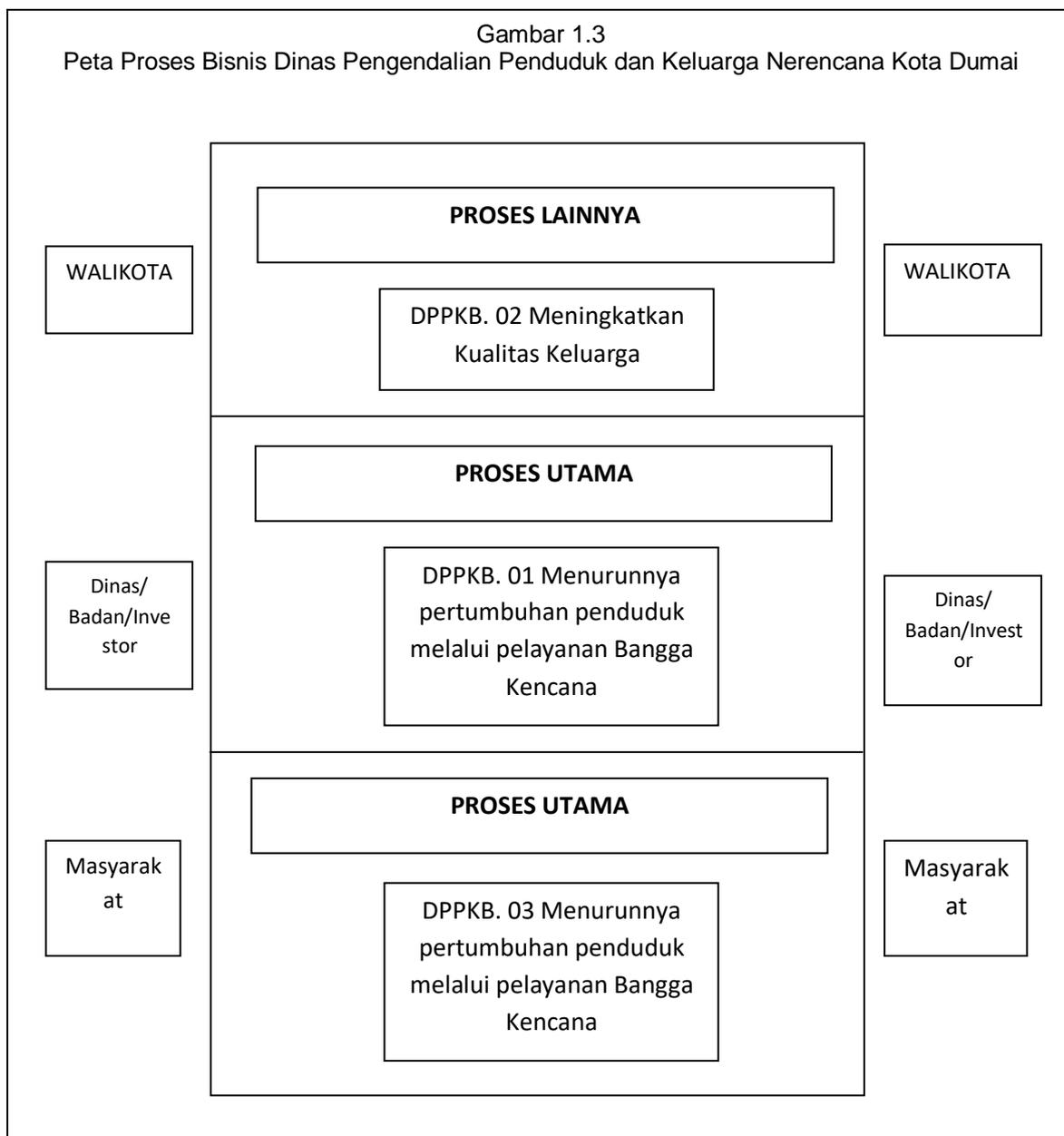
Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.2
Cascading Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai



1.6 PETA PROSES BISNIS

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana skema berikut:



1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1312.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023. Hal hasil evaluasi implementasi SAKIP Internal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain :

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar mendokumentasikan secara baik setiap pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan tugas seperti dokumentasi surat tugas/undangan/nota dinas, foto kegiatan, daftar hadir dan laporan kegiatan.
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar menformalkan Indikator Kinerja Individu dan SOP dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas; dan
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya hingga ke output rekomendasi.

Sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi Insepektorat yang diberikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan melaksanakan apa yang disarankan.

BAB. II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana yang tujuannya yaitu untuk mengetahui potensi yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023 serta untuk mengetahui permasalahan dan upaya pemecahannya dalam penyelenggaraan tugas Tahun Anggaran 2021 – 2026.

2.1 RENCANA STRATEGIS

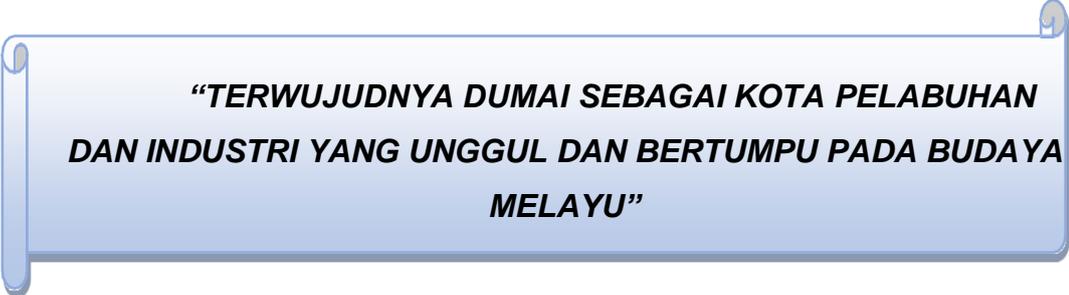
Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai. RENSTRA

juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :



***“TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN
DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA
MELAYU”***

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan

diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai :



2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan

jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Dumai Tahun 2023

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu					
Misi ke 2: <i>Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu</i>					
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Mengendalikan laju pertumbuhan Penduduk dalam Program Bangga Kencana	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,08%	Menurunkan pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	46,6%
				Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	19,93%

2.3 KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel 2.2

Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Dumai Tahun 2023

VISI :			
Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI II :			
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengendalikan laju pertumbuhan Penduduk dalam Program Bangga Kencana	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Peningkatan Pelayanan KB	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jaminan ketersediaan alokondan sarana penunjang 2 Peningkatan Akses dan Kualitas Pembinaan Pelayanan KB 3 Pelayanan KB di wilayah masyarakat miskin (tidak mampu) 4 Pembinaan pelayanan KB swasta dan standarisasi 5 Sosialisasi, promosidan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi
		Pembinaan Remaja	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan Pengetahuan Sikap dan Perilaku dalam menolak pernikahan dini 2 Peningkatan Pengetahuan Sikap dan Perilaku dalam menolak Pornografi dan Perilaku seksual menyimpang 3 Peningkatan Pengetahuan Sikap dan Perilaku dalam Menolak penggunaan narkoba
		Pembangunan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perwujudan kesadaran kolektif keluarga dalam program pengasuhan dan pembinaan keluarga berdasarkan siklus kehidupan 2 Peningkatan Pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga 3 Pembinaan kesertaan ber KB bagi PUS anggota Poktan

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			(BKB,BKR,BKL, UPPKS)
		Penguatan Advokasi dan KIE KB	1 Peningkatan Advokasi dan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) Program Bangga Kencana 2 Pembinaan Lini Lapangan oleh PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD (Kader) 3 Penguatan Kemitraan Penguatan Implementasi Program di Lini Lapangan (melalui Kampung KB)

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangsa	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
		Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai di Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Dumai Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	19,93%
		Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	46,6%

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis OPD sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 9.220.272.782,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) untuk melaksanakan 4 (Empat) Program Kerja antara lain :

Tabel 2.5
Program Kerja Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4
1.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 163.000.000,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 237.980.830,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 255.700.100,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.855.015.692,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
J U M L A H		Rp. 4.511.696.622,-	

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Program Kerja Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4
1.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 453.720.000,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 2.600.479.830,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB – Reguler - KB dan DAK Non Fisik- BOKB-KB
3.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 1.721.020.100,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana dan DAK Non Fisik- BOKB-KB Bagi Hasil
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.445.052.852,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp. 9.220.272.782,-	

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI TAHUN 2023

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam

penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

- a. Rumus :
$$\text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja

yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$b. \text{ Rumus : } \text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel 3.2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dalam implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai telah menetapkan 1 (Satu) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai pada tahun 2023

berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel 3.2 dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			Predikat Capaian
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	53.80%	119.03%	46.6%	66,02%	141,67%	Sangat Berhasil
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	27.2%	82.80%	19.93%	13,02%	153,07%	Sangat Berhasil

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Indikator Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)
 - a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 46,6% realisasi sebesar 66,02%, tercapai 141,67% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 53,80% atau tercapai sebesar 119,03%, maka capaian tahun 2023 meningkat 23,03%
 - b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :
 - Ketersediaan Informasi dan Pendidikan di Sekolah Sekolah yang ada Di Kota Dumai
 - Ketersediaan Akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang ada di faskes atau PMB (Praktik Mandiri Bidang)
 - Ketersediaan dan keragaman metode kontrasepsi yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan individu

- Dukungan pemerintah dan kemitraan dalam mendukung program program keluarga berencana
 - Perubahan norma sosial dan budaya dengan cara edukasi atau kampanye yang bertujuan mengubah persepsi negatif terhadap kontrasepsi
 - Mendorong Kesetaraan gender dengan cara mengajak pria untuk ber KB
- c. Faktor penghambat Capaian Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) adalah sebagai berikut:
- Keterbatasan kendaraan untuk melakukan pelayanan di daerah sulit
 - Norma budaya atau agama yang menghambat pendidikan seksual
 - Stigma terkait penggunaan kontrasepsi atau isu isu sosial dan budaya yang melibatkan diskriminasi terhadap individu atau keluarga yang menggunakan kontrasepsi dapat membuat orang enggan mengakses atau mengungkapkan kebutuhan mereka
 - Persepsi negatif terhadap efek samping tertentu atau mitos seputar kontrasepsi dapat mengurangi tingkat penerimaan
 - Masalah kesehatan tertentu atau ketidaksetujuan oleh profesional kesehatan terhadap penggunaan kontrasepsi tertentu dapat mempengaruhi tingkat penerimaan
 - Ketidaksetujuan dari pasangan atau keluarga terhadap penggunaan kontrasepsi dapat menjadi hambatan serius.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) adalah sebagai berikut:
- Mengimplementasikan program pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah-sekolah dan komunitas untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang berbagai jenis kontrasepsi, manfaatnya, dan cara penggunaannya.
 - Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan reproduksi yang menyediakan informasi, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan harga terjangkau.

- Memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam memberikan informasi dan konseling tentang kontrasepsi, serta memastikan ketersediaan dan distribusi kontrasepsi yang aman dan efektif.
- Melakukan kampanye informasi masyarakat yang ditargetkan untuk memerangi mitos dan misconceptions seputar kontrasepsi, serta menyoroti manfaatnya bagi kesehatan reproduksi dan keluarga.
- Mendorong kesetaraan gender dan partisipasi aktif wanita dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi, termasuk keputusan penggunaan kontrasepsi.
- Integrasi layanan kesehatan reproduksi ke dalam sistem kesehatan umum untuk memastikan bahwa kontrasepsi dianggap sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan primer.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur terhadap program-program kesehatan reproduksi, termasuk CPR, untuk menilai efektivitas dan membuat penyesuaian sesuai kebutuhan.
- Melibatkan komunitas secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program kesehatan reproduksi untuk memastikan relevansi dan penerimaan yang lebih baik.
- Mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung akses mudah dan aman terhadap kontrasepsi, serta menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan kontrasepsi

2. Indikator Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

- a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 19,93% realisasi sebesar 13,02%, tercapai 153,07% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 27,2% atau tercapai sebesar 82,80%, maka capaian tahun 2023 meningkat 70,27%

- b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :
- Ketersediaan Informasi dan Pendidikan di Sekolah Sekolah yang ada Di Kota Dumai
 - Ketersediaan Akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang ada di faskes atau PMB (Praktik Mandiri Bidang)
 - Ketersediaan dan keragaman metode kontrasepsi yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan individu
 - Dukungan pemerintah dan kemitraan dalam mendukung program program keluarga berencana
 - Perubahan norma sosial dan budaya dengan cara edukasi atau kampanye yang bertujuan mengubah persepsi negatif terhadap kontrasepsi
 - Mendorong Kesetaraan gender dengan cara mengajak pria untuk ber KB
- c. Faktor penghambat Capaian Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) adalah sebagai berikut:
- Keterbatasan kendaraan untuk melakukan pelayanan di daerah sulit
 - Keterbatasan sumber daya ekonomi dapat membuat sulit bagi individu atau keluarga untuk membeli kontrasepsi atau mendapatkan layanan kesehatan reproduksi
 - Norma budaya atau agama yang menghambat pendidikan seksual
 - Stigma terkait penggunaan kontrasepsi atau isu isu sosial dan budaya yang melibatkan diskriminasi terhadap individu atau keluarga yang menggunakan kontrasepsi dapat membuat orang enggan mengakses atau mengungkapkan kebutuhan mereka
 - Persepsi negatif terhadap efek samping tertentu atau mitos seputar kontrasepsi dapat mengurangi tingkat penerimaan
 - Masalah kesehatan tertentu atau ketidaksetujuan oleh profesional kesehatan terhadap penggunaan kontrasepsi tertentu dapat

- mempengaruhi tingkat penerimaan
- Tingkat pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi pemahaman dan akses terhadap kontrasepsi.
 - Ketidaksetujuan dari pasangan atau keluarga terhadap penggunaan kontrasepsi dapat menjadi hambatan serius
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) adalah sebagai berikut:
- Mengimplementasikan program pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah-sekolah dan komunitas untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang berbagai jenis kontrasepsi, manfaatnya, dan cara penggunaannya.
 - Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan reproduksi yang menyediakan informasi, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan harga terjangkau.
 - Memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam memberikan informasi dan konseling tentang kontrasepsi, serta memastikan ketersediaan dan distribusi kontrasepsi yang aman dan efektif.
 - Melakukan kampanye informasi masyarakat yang ditargetkan untuk memerangi mitos dan misconceptions seputar kontrasepsi, serta menyoroti manfaatnya bagi kesehatan reproduksi dan keluarga.
 - Mendorong kesetaraan gender dan partisipasi aktif wanita dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi, termasuk keputusan penggunaan kontrasepsi.
 - Integrasi layanan kesehatan reproduksi ke dalam sistem kesehatan umum untuk memastikan bahwa kontrasepsi dianggap sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan primer.
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur terhadap program-program kesehatan reproduksi, termasuk CPR, untuk menilai efektivitas dan membuat penyesuaian sesuai kebutuhan.
 - Melibatkan komunitas secara aktif dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi program-program kesehatan reproduksi untuk memastikan relevansi dan penerimaan yang lebih baik.

- Mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung akses mudah dan aman terhadap kontrasepsi, serta menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan kontrasepsi

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	45,2%	46.6%	53.80 %	66,0 2%	119.03 %	141 ,67 %
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	22,36%	19.93 %	27.2%	13,02 %	82.80 %	153, 07%

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Pada Tahun 2022 Terdapat 2 Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) dengan target pada tahun 2022 adalah 45,2% berasal dari perhitungan Jumlah Peserta KB Aktif dibagi dengan Jumlah Pasangan Usia Subur.

- b. Pada tahun 2022 jumlah Peserta KB Aktif sebanyak 23.490 akseptor dengan jumlah Pasangan Usia Subur pada tahun 2022 sejumlah 43.640 Pasangan Usia Subur. Realisasi pada tahun 2022 adalah 53,80% dengan capaian 119,03%
 - c. Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 46,6% dan realisasinya adalah 66,02% dengan rincian jumlah Peserta KB Aktif sebanyak 30.301 akseptor dengan jumlah Pasangan Usia Subur pada tahun 2023 sejumlah 45.899 Pasangan Usia Subur dan capaian kinerja adalah 141,67%
- 2a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dengan target pada tahun 2022 adalah 22,36% berasal dari perhitungan Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi dibagi dengan Jumlah Pasangan Usia Subur.
- b. Pada tahun 2022 jumlah Peserta KB Aktif sebanyak 11.873 akseptor dengan jumlah Pasangan Usia Subur pada tahun 2022 sejumlah 43.640 Pasangan Usia Subur. Realisasi pada tahun 2022 adalah 27,2% dengan capaian 82,80%
 - c. Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 19,93% dan realisasinya adalah 13,02% dengan rincian jumlah Peserta KB Aktif sebanyak 5.977 akseptor dengan jumlah Pasangan Usia Subur pada tahun 2023 sejumlah 45.899 Pasangan Usia Subur dan capaian kinerja adalah 153,07%

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (*RENJA SKPD*) tahun 2023 dapat dikatakan SANGAT BERHASIL walaupun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	49.9%	66,02%	132,30%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15.30%	13,02%	117,51%

Upaya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dalam mempercepat Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) sebagai berikut :
 1. Melakukan Distribusi Alokasi ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
 2. Membina fasilitas Kesehatan yang teregistrasi di aplikasi Siga yang melaksanakan pelayanan keluarga berencana baik secara rutin tiap bulannya maupun pelayanan keluarga berencana baksos.
 3. Melakukan Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang dilakukan di Faskes termasuk jaringan dan jejaringan.
2. Capaian Indikator Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) sebagai berikut :

1. Melakukan Distribusi Alokasi ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
2. Melakukan Pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan
3. Pertemuan Evaluasi Radalgram (Rapat Pengendalian Program) di Aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA)
4. Orientasi teknis dalam pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas
5. Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB
6. Pertemuan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan di Kampung KB (POKTAN)
7. Pembuatan/produksi dan/atau penayangan/penempatan (placement) media cetakan yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan penurunan stunting.
8. Pembinaan Kelompok Kegiatan (POKTAN)
9. Terlaksananya Ajang Pemilihan Duta Genre Kota Dumai Tahun 2023
10. Terlaksananya Hari Keluarga Nasional Tingkat Provinsi Riau

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional sebagaimana tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	66,02%	62,92%	Target ini diambil dalam Renstra BKKBN Tahun 2020-2024
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	13,02%	7,7%	

3.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 9.220.272.782,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) bersumber dari Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB – Reguler – KB, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil dan DAK Non Fisik- BOKB-KB. Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 8.936.991.782,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 283.281.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

1. Belanja Operasi	:	Rp.	8.936.991.782,-
2. Belanja Modal	:	Rp.	283.281.000,-
J u m l a h	:	Rp.	9.220.272.782,-

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 8.838.452.715 (Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Belas), terdiri dari Belanja Operasi Rp. 8.555.320.215,- (Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp. 283.132.500,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Program Pengendalian Penduduk	453.720.000,-	451.329.100,-	99,47%	225.664.550,-
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.600.479.830,-	2.448.718.400,-	94,16%	612.179.600,-
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.721.020.100,-	1.708.887.850,-	99,30%	1.708.887.850,-

Total anggaran belanja adalah Rp. 4.775.219.930,- dengan realisasi Rp. 4.608.935.350,- atau dengan capaian sebesar 96,52% dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100% dikarenakan ada factor yang mempengaruhi di antaranya tingginya standar harga yang telah ditentukan oleh kementerian dari standar pasar tetapi secara fisik kegiatan (pengadaan) terealisasi 100%.

3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan :					4.775.219.930,-	4.608.935.350,-	96,51%
Mengendalikan laju pertumbuhan Penduduk dalam Program Bangga Kencana	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%)	2,08%	2,07%	100,48%			
Sasaran :							

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	46,6%	66,02%	141,67%			
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	19,93%	13,02%	153,07%			
Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	50%	50%	100%	453.720.000,-	451.329.100	99,47%
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	51%	50%	98,04%			
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,54%	2,2%	95%	2.600.479.830,-	2.448.718.400,-	94,16%
	ASFR 15-19	12,67%	12,6%	100,55%			
	UKP	22 Usia	22,36%	101,64%			
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	78%	78%	100%	1.721.020.100,-	1.708.887.850,-	99,30%

3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Pada Indikator Kinerja Utama 1 Tingkat Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) tingkat efisiensinya adalah 42 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023(141,67%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran

tahun 2022 (99,47%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

- b. Pada Indikator Kinerja Utama 2 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) tingkat efisiensinya adalah 56 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (153,07%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2022 (96,20%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berekana Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9

Prestasi dan Penghargaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berekana Kota Dumai Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Duta Genre Putra Indonesia 2023	Juara I	Nasional	BKKBN
2	Pengelola DAK Subbidang KB Tahun 2022	Terbaik I	Provinsi Riau	Gubernur Riau
3	Capaian Pelaksanaan Program Bangga Kencana Dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 Kategori Kota	Terbaik I	Provinsi Riau	Perwakilan BKKBN Provinsi Riau
4	Kabupaten/Kota dengan Realisasi Anggaran Menu BOKB Audit Kasus Stunting dan BKB Kit Stunting Tertinggi berdasarkan Morena Per 16 Agustus 2023 dalam Kolaborasi Konsolidasi dan Akselerasi menu BOKB Audit Kasus Stunting dan BKB Kit Stunting Indonesia	Terbaik	Nasional	BKKBN



BAB. IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggung jawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023 disusun berdasarkan RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 dengan kesuaian RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 - 2026, Dokumen RKPD tahun 2023, Capaian IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023 serta Perjanjian Kinerja 2023 beserta perubahannya. Dalam laporan ini mengukur Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar yang terdiri atas 1 Kinerja Utama dengan 3 Indikator Kinerja Sasaran dengan hasil sebagai berikut :

- a. Indikator 1 Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) dengan capaian 142,06% pada Tahun 2023 dari perhitungan jumlah Peserta KB Aktif sebanyak 30.301 akseptor dengan jumlah Pasangan Usia Subur pada tahun 2023 sejumlah 45.899 Pasangan Usia Subur. Dari target 46,6% bisa direalisasikan 66,02% dan termasuk Kategori SANGAT BERHASIL.
- b. Indikator 1 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dengan capaian 153,07% pada Tahun 2023 dari perhitungan jumlah Peserta KB Aktif sebanyak 5.977 akseptor dengan jumlah

Pasangan Usia Subur pada tahun 2023 sejumlah 45.899 Pasangan Usia Subur. Dari target 19,93% bisa direalisasikan 13,02% dan termasuk Kategori SANGAT BERHASIL.

Tabel 4.1
CAPAIAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI TAHUN 2023

No	SASARAN		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	46.6%	66,02 %	142,06 %	Sangat Berhasil
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	19.93 %	13,02%	153,07 %	Sangat Berhasil

B. SARAN

Masih diperlukan perbaikan pada berbagai kegiatan sehingga dapat dipertahankan dan bahkan mungkin dapat lebih ditingkatkan pencapaian kinerjanya. Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai ditahun yang akan datang, maka diperlukan berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja. Upaya-upaya tersebut yaitu :

1. Lebih memprioritaskan perencanaan yang disenergiskan dengan Rencana strategis Kementerian BKKBN Pusat sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Dumai
2. Meningkatkan pengawasan guna menjaga agar rencana kerja dapat dilaksanakan secara optimal
3. Meningkatkan disiplin administrasi dalam membuat pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku

4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan kegiatan agar mencapai sasaran dan tujuan guna mewujudkan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai
5. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada sebagai Pelaksana kegiatan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana lebih maksimal
7. Dilaksanakan penyempurnaan dalam penyusunan LKj tahun 2024 dengan mengidentifikasi penetapan indikator untuk kegiatan, program dan arah kebijakan yang didasari atas prioritas pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka menuju pencapaian Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Pada tahun tersebut.
8. Melakukan pelayanan akseptor didaerah galsitas/perbatasan, meningkatnya pengetahuan kader program KKBPK, dan menambah alat peraga untuk penyuluhan atau penyuluhan Poktan serta mengadakan operasional kader Poktan dan PIK Remaja atau Mahasiswa

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023 semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tulus dan ikhlas bersama-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai.

LAMPIRAN



**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINASPENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA DUMAI
TAHUN 2021 - 2026**

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu
MISI 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
SASARAN 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Mengendalikan laju pertumbuhan Penduduk dalam Program Bangga Kencana	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	$r = \frac{(P_t/P_0)}{t} \times 100$	2,22%	2,2%	2,12%	2,08%	2,04%	2,01%	1,98%	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{(\text{Jumlah PUS yang ingin ber-@KB tetapi tidak terpenuhi})}{(\text{Jumlah Pasangan Usia Subur})} \times 100\%$	29,92%	13,9%	22,36%	19,93%	17,94%	16,26%	15,30%	Pembinaan Remaja	1. Peningkatan Pengetahuan Sikap dan Perilaku dalam menolak pernikahan dini 2. Peningkatan Pengetahuan Sikap dan Perilaku dalam menolak Pornografi dan Perilaku seksual menyimpang 3. Peningkatan Pengetahuan Sikap dan Perilaku dalam Menolak penggunaan narkoba	1. Program Pengendalian Penduduk 2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	
																			Pembangunan Keluarga	1. Perwujudan kesadaran kolektif keluarga dalam program pengasuhan dan pembinaan keluarga berdasarkan siklus kehidupan			

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																					2. Peningkatan Pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga 3. Pembinaan kesertaan ber KB bagi PUS anggota Poktan (BKB, BKR, B KL, UPPKS)		
																				Penguatan Advokasi dan KIE KB	1. Peningkatan Advokasi dan KIE (Komunikasi Edukasi) Program Bangsa Kencana 2. Pembinaan Lini Lapangan oleh PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD (Kader) 3. Penguatan Mitraan Penguatan Implementasi Program di Lini Lapangan (melalui Kampung KB)		

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
											Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	$(\text{Jumlah Peserta KB aktif}) / (\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}) \times 100\%$	41,7%	75,1%	45,2%	46,4%	47,7%	48,8%	49,9%	Peningkatan Pelayanan KB	1. Jaminan ketersediaan alokon dan sarana penunjang 2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pembinaan Pelayanan KB 3. Pelayanan KB di wilayah masyarakat miskin (tidak mampu) 4. Pembinaan pelayanan KB swasta dan standarisasi 5. Sosialisasi, promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai Akuntabilitas Kinerja instansi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai Akuntabilitas Kinerja instansi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun N			B	B	B	B	B	Meningkatnya akuntabilitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai Akuntabilitas Kinerja instansi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai Akuntabilitas Kinerja instansi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun N			B	B	B	B	B	Optimalisasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah melalui Fasilitasi Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ELYWARTI, SKM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI**

Selanjutnya di sebut : **Pihak Pertama.**

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**
Jabatan : **WALIKOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 03 Januari 2023



H. PAISAL, SKM, MARS



ELYWARTI, SKM
NIP. 19661029 199003 2 004

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
				2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)	%	19.93
		Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) (%)	%	46.6

Sasaran 1 : Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana

1. Program Pengendalian Penduduk	Rp.	163.000.000
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	237.980.830
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.	255.700.100
Jumlah	Rp.	656.680.930



Dumai, 03 Januari 2023

Pihak Pertama
KEPALA

ELYWARTI, SKM
NIP. 19661029 199003 2 004



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **ELYWARTI, SKM**
J a b a t a n : **KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI**

Selanjutnya di sebut : ***Pihak Pertama.***

N a m a : **H. PAISAL, SKM, MARS**
J a b a t a n : **WALI KOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama.***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023



H. PAISAL, SKM, MARS



ELYWARTI, SKM

NIP. 19861029 199003 2 004

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
				2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)	%	19.93
		Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) (%)	%	46.6

Sasaran 1 : Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana

Program			
1. Pengendalian Penduduk	Rp.		453.720.000
Program Pembinaan			
2. Keluarga Berencana (KB)	Rp.		2.600.479.830
Program Pemberdayaan dan			
3 Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.		1.721.020.100
Jumlah	Rp.		4.775.219.930

Dumai, 25 September 2023



**PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	2023	Target Tahunan
				2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	%	46,6%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) (%)	%	19,93%

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, dan
Keluarga Berencana Kota Dumai.



ELYWARTI, SKM
NIP. 19661029 199003 2 004

**EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BERKALA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target / Realisasi											
					Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
					Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	3 Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)	4 %	5 46,6 19,93	6 0 0	7 0 0	8 0 0	9 0 0	10 0 0	11 0 0	12 0 0	13 0 0	14 0 0	15 46,6 19,93	16 66,02 13,02	17 141,67% 153,07%

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana Berencana Kota Dumai,



**TABEL REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KINERJA			PROGRAM	KEUANGAN		
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	%	46.6	66.02	141.67%	Program Pengendalian Penduduk	2,600,479,830	2,448,718,400	94.16%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)	%	19.93	13.02	153.07%	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	453,720,000	451,329,100	99.47%
							Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1,721,020,100	1,708,887,850	99.30%

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,445,052,852	4,229,517,365	95.15%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,799,500	17,799,400	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17,799,500	17,799,400	100.00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,977,228,522	2,773,613,662	93.16%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,896,388,622	2,692,773,762	92.97%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30,000,100	30,000,100	100.00%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	50,839,800	50,839,800	100.00%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19,589,900	19,589,900	100.00%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19,589,900	19,589,900	100.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	436,171,907	431,206,688	98.86%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,963,000	2,951,000	99.60%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70,270,100	66,583,050	94.75%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,120,707	9,085,000	99.61%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12,000,000	12,000,000	100.00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72,728,100	72,718,050	99.99%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,000,000	4,780,000	79.67%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	263,090,000	263,089,588	100.00%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	275,208,000	275,007,500	99.93%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125,208,000	125,160,000	99.96%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150,000,000	149,847,500	99.90%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330,465,460	324,410,215	98.17%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,170,000	1,170,000	100.00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90,463,300	85,926,956	94.99%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	238,832,160	237,313,259	99.36%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388,589,563	387,890,000	99.82%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161,189,563	160,700,000	99.70%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27,400,000	27,190,000	99.23%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,000,000	200,000,000	100.00%
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	453,720,000	451,329,100	99.47%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	304,920,000	302,652,250	99.26%
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	125,800,000	123,532,400	98.20%
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	179,120,000	179,119,850	100.00%
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	148,800,000	148,676,850	99.92%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	88,800,000	88,799,750	100.00%
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	42,600,000	42,600,000	100.00%
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	17,400,000	17,277,100	99.29%
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2,600,479,830	2,448,718,400	94.16%
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	738,050,000	736,765,000	99.83%
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	57,400,000	56,700,000	98.78%
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150,000,000	149,630,000	99.75%
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	115,645,000	115,500,000	99.87%
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	337,050,000	337,050,000	100.00%
	Pengendalian Program KKBPK	77,955,000	77,885,000	99.91%
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	368,200,000	367,700,000	99.86%
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	38,000,000	37,800,000	99.47%
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	264,200,000	263,900,000	99.89%
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	66,000,000	66,000,000	100.00%
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1,376,729,830	1,226,753,400	89.11%
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45,019,900	44,976,100	99.90%
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	777,748,930	738,507,300	94.95%
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	526,581,000	415,900,000	78.98%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27,380,000	27,370,000	99.96%
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	117,500,000	117,500,000	100.00%
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	8,300,000	8,300,000	100.00%
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	109,200,000	109,200,000	100.00%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,721,020,100	1,708,887,850	99.30%
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1,721,020,100	1,708,887,850	99.30%
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360,000,000	352,350,000	97.88%
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	238,700,050	238,314,150	99.84%
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	907,200,000	907,200,000	100.00%
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5,000,050	5,000,050	100.00%
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	110,120,000	109,634,850	99.56%
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100,000,000	96,388,800	96.39%
	JUMLAH	9,220,272,782	8,838,452,715	95.86%

DOKUMENTASI KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



DOKUMENTASI KELOMPOK KEGIATAN BKB DAN BKL



DOKUMENTASI KEGIATAN MINI LOKAKARYA



DOKUMENTASI PEMBINAAN UPPKA



DOKUMENTASI PEMBINAAN PIK R DAN BKR



DOKUMENTASI PEMBINAAN UPPKA PRO PN DI KAMPUNG KB



DOKUMENTASI PEMBINAAN UPPKA PRO PN DI KAMPUNG KB



DOKUMENTASI PEMBINAAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN



DOKUMENTASI PERTEMUAN PROGRAM BANGGA KENCANA



DOKUMENTASI PELAYANAN KB



DOKUMENTASI PEMBINAAN PELAYANAN KB DI FASKES